

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Linda Retno Tri Ambarwati dan Hesti Asriwandari yang berjudul “Tradisi Sinoman Sebagai Sistem Pertukaran Sosial di Dalam Pelaksanaan Pesta Pernikahan Adat Jawa” yang menghasilkan kesimpulan bahwa Tradisi *sinoman* adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan masyarakat kepada keluarga yang akan menggelar pernikahan, dan bantuan yang telah diberikannya akan kembali lagi sewaktu masyarakat yang membantu akan menggelar pesta pernikahan. Tradisi *sinoman* merupakan suatu pertukaran sosial yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi yang sangat berguna masyarakat dan sangat membantu sekali dalam pelaksanaan pernikahan. Penelitian juga dilakukan oleh Rahayu Liana (2006) yang berjudul “Perkawinan Merarik Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat” dalam penelitian ini menyimpulkan bagaimana hukum waris, hukum perkawinan, faktor penyebab perkawinan hingga cara-cara penyelesaian secara adat yang ditempuh masyarakat adat suku sasak.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas peneliti mencoba melihat dari perspektif kesejahteraan keluarga dalam pertukaran sosial sehingga dengan terjadinya pertukaran sosial dalam perkawinan adat yang dilakukan apakah keluarga termasuk sejahtera atau tidak dan bagaimana pandangan sejahtera menurut masyarakat sumba. Inilah yang membedakan penelitian terdahulu dengan apa yang akan dilakukan peneliti.

B. Hukum Perkawinan Adat

Hukum Perkawinan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan segala akibatnya, perceraian dan harta perkawinan. Dalam hukum adat perkawinan, hukum perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang atau beberapa orang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi. Menurut hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang kawin, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Bagi suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku itu dengan tertibnya.

Bagi masyarakat (persekutuan), perkawinan juga merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya. Bagi kasta, perkawinan juga penting, karena kasta dalam masyarakat (dahulu) sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri. Oleh karena perkawinan ini memiliki arti yang sangat penting, maka pelaksanaannya senantiasa disertai dengan upacara-upacara adat, kadang lengkap dengan sesajen-sesajennya. Agar mempelai berdua selamat mengarungi hidup baru sampai akhir hayatnya atau sering disebut dengan sampai kaken-kaken dan ninen-ninen. Segala upacara-upacara ini merupakan upacara peralihan, upacara yang melambangkan perubahan status dari mempelai berdua; yang tadinya hidup berpisah, setelah melalui upacara-upacara itu menjadi hidup bersama dalam suatu keluarga (sumah) sebagai

suami istri. Semula mereka milik orang tuanya, kemudian menjadi keluarga mandiri (Hadikusuma, 1982, 105-110).

Hukum adat merupakan aturan yang telah menjadi kebiasaan setiap suku yang tidak akan mungkin lepas dari kehidupan mereka di mana kebiasaan itu telah turun temurun dijalankan dari nenek moyang mereka sendiri. Suatu kebiasaan dan tradisi yang telah melekat pada setiap anak cucu mereka. Perkawinan adat dalam masyarakat juga dianggap sebagai salah satu peristiwa penting yang tetap harus dijaga dalam kehidupan mereka yang bukan hanya suami istri yang bersangkutan tetapi juga orang tua, saudara dan keluarga kedua belah pihak.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina hubungan keluarga rumah tangga, tetapi juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan saling menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai (Hadikusuma, 2003: 70).

Perkawinan hukum adat di atas mengatur bagaimana hubungan kekeluargaan tetap terjaga baik itu dari keluarga pria maupun wanita menjalani kehidupan yang tenteram, aman dan harmonis.

Perkawinan adalah perikatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat, bertetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi

perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya (Hadikusuma, 1990 : 10).

Perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani berarti suatu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan rukun sesuai dengan anjuran agama. Perkawinan adalah perjalanan hidup berumah tangga untuk mencapai kehidupan yang diidamkan. Perkawinan bukanlah semata-mata hanya hal bersetubuh antara seorang pria dan wanita, tetapi dilakukan untuk saling memelihara dan memberi semangat hidup. Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut aturan perundangan, perkawinan itu ialah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu.

Perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk maksud tersebut diperlukan adanya peraturan yang akan menentukan persyaratan apa yang harus dipenuhi. Jadi menurut UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan berarti sama dengan perikatan. Ikatan lahir yang dimaksud dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 ialah bahwa para pihak yang bersangkutan, karena perkawinan suami istri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun dalam hubungannya dengan masyarakat

lain. Pengertian ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami-istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia.

Pengertian perkawinan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 perlu dipahami oleh masyarakat, karena merupakan landasan dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan

Perkawinan tanpa adanya kehendak sukarela dari pihak-pihak yang akan melangsungkannya boleh dianggap tidak sah. Faktor sukarela, pencerminannya tampak dalam persetujuan para mempelai untuk melangsungkan suatu perkawinan merupakan syarat penting untuk dapat dilaksanakan. Di samping syarat-syarat lainnya yang juga harus dipatuhi oleh kedua pihak.

C. Asas-Asas Perkawinan

Asas - asas yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tercantum adalah:

1. Bahwa perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, keduanya dapat mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan yang bersifat material dan spiritual.
2. Perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundangan yang berlaku.

3. Perkawinan harus memenuhi administrasi dengan jalan mencatatkan diri pada kantor pencatatan yang telah ditentukan oleh perundang- undangan.
4. Perkawinan menurut asas monogami, meskipun tidak bersifat mutlak karena masih ada kemungkinan untuk beristri lebih dari seorang, bila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan dan ajaran agamanya mengijinkan untuk itu ketentuan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang- undang.
5. Perkawinan dilakukan oleh pihak yang telah matang jiwa raganya atau telah dewasa, kematangan ini sesuai dengan tuntutan jaman di manabarudilancarkan keluarga berencana dalam rangka pembangunan nasional.
6. Memperkecil dan mempersulit perceraian.
7. Kedudukan suami istri dalam kehidupan perkawinan adalah seimbang baik kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan agar masyarakat adat dapat menyesuaikan hukum adatnya dengan Undang-Undang tersebut dan sejauh mana masyarakat menyesuaikan kehidupan mereka itu tergantung dari perkembangan masyarakat adat itu sendiri dan kesadaran hukumnya.

D. Sistem Perkawinan Adat

Dalam suatu masyarakat adat ada suatu sistem perkawinan, di mana masing-masing sistem mempunyai pengaruh tersendiri terhadap status anak, waris, kedudukan anak di dalam suatu masyarakat adat, adapun sistem perkawinan tersebut adalah (Hadikusuma, 2003: 67):

1. Sistem Endogami

Sistem endogami adalah suatu perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang menikah harus berasal dari keluarganya sendiri atau marganya sendiri.

2. Sistem Exogami

Sistem exogami adalah suatu sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang menikah dengan orang lain yang berasal dari suku atau marga lain.

3. Sistem Eleuxthrogami

Sistem eleuxthrogami adalah suatu sistem perkawinan yang menganut sistem endogami dan exogami. sistem ini tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan. Adapun larangan-larang dalam sistem ini adalah larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan. Larangan-larangan tersebut adalah yang berkaitan dengan nasab di mana dilarang menikah dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Di samping larangan nasab ada juga larangan musyarahah (periparan) yakni dilarang menikahi ibu tiri, menantu, mertua dan anak tiri.

E. Tujuan Perkawinan

Manusia di mana pun keberadaannya di dunia ini, dalam melaksanakan suatu perkawinan tentu mempunyai suatu tujuan, yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur demi memperoleh suatu kebahagiaan baik material maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kabahagiaan yang sifatnya

sementara saja tetapi kebahagiaan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangannya.

Untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi, haruslah didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan haruslah memperhatikan intisari dari perintah agama yang menggariskan bahwa semua hal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diperbuatnya. Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pembentukan keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orangtua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut aturan perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam ketentuan keluarga yang aman dan abadi yang bersifat parental (Hadi kusuma, 1990: 22).

F. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 terdapat beberapa prinsip demi menjamin cita-cita luhur dari perkawinan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah :

1. Undang-undang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Karena perkawinan mempunyai maksud agar supaya suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia

dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami istri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

2. Perkawinan adalah merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan menginjak dunia baru, membentuk keluarga baru, sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia, dan sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarganya untuk merestui perkawinan itu, oleh karena itu bagi yang masih berada di bawah usia 21 tahun (pria dan wanita) maka diperlukan ijin dari orangtua.
3. Perceraian adalah suatu yang amat tidak diharapkan oleh suami istri. Perceraian bukan saja akan merugikan kedua belah pihak tetapi terutama anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan tentang kemungkinan terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
4. Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 berasas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
5. Undang-undang No. 1 tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan pernikahan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan anak-anak dibawah umur. Oleh karena itu undang-

undang menentukan batas umur untuk kawin, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan dibawah umur tersebut dimungkinkan, tetapi setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan atas permintaan orangtua.

6. Wanita merupakan makhluk yang paling banyak membutuhkan perlindungan. Pada masa-masa yang lain, dikala pria mempergunakan hak cerai secara semena-mena maka wanitalah yang paling banyak mengalami penderitaan. Akibat perceraian, bukan saja merupakan suatu pukulan moril bagi wanita, tetapi juga sangat memberatkan kehidupannya.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berusaha menghilangkan akibat negatif tersebut dengan cara sebagai berikut:

1. Dimungkinkan adanya perjanjian di mana wanita dapat ikut menentukan isinya.
2. Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan di mana istri mempunyai hak yang sama dengan suami. Bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut hukum.
3. Suami tetapi bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sekalipun terjadi perceraian.
4. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dalam hal terjadi perceraian yang menurut pertimbangan pengadilan perlu diterapkan demikian.

5. Wanita diberi kedudukan yang sama dengan pria dalam memutuskan jodohnya dan dalam membuat syarat-syarat perjanjian yang dikehendaki oleh kedua belah pihak.

G. Konsep Keluarga Sejahtera

1. Pengertian Keluarga

Keluarga dibentuk dari dua individu berlainan jenis kelamin yang diikat tali perkawinan. Bisa diartikan suatu ikatan laki-laki dengan perempuan berdasarkan hukum dan Undang – Undang perkawinan yang sah. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga terdiri dari suami, istri, atau orang tua dan anak.

Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan perempuan, perhubungan yang mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk murni merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak (Ahmadi, 2002:239).

Keluarga sebagai organisasi mempunyai perbedaan dengan organisasi-organisasi lainnya. Salah satu perbedaan yang cukup penting terlihat dari bentuk hubungan anggota – anggotanya yang lebih bersifat lebih mendalam dan merupakan ciri – ciri kelompok primer yaitu mempunyai hubungan yang lebih intim, kooperatif, dan masing – masing

anggota memperlakukan anggota lainnya sebagai tujuan bukannya sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Keluarga merupakan kelompok sosial dengan tujuan, struktur, norma, dinamika kelompok, termasuk cara-cara kepemimpinannya yang sangat mempengaruhi kehidupan individu yang menjadi anggota keluarga tersebut. Begitu pula cara-cara bertingkah laku orang tua yang dalam hal ini menjadi pemimpin kelompok sangat mempengaruhi suasana interaksi keluarga dan dapat merangsang perkembangan ciri-ciri tertentu pribadi anaknya. Dari sudut metode konstruksi ideal, keluarga merupakan suatu lembaga dan sebagai suatu pertemanan yang akan memperlihatkan dua konsep yang berlawanan. Perumusan teoritis yang paling jelas dari keluarga sebagai suatu lembaga di mana ikatannya akan ditentukan secara luas oleh tekanan sosial yang berkenaan pada anggota keluarga. Konstruksi ideal dari keluarga sebagai pertemanan akan terfokus pada satuan yang berkembang di luar hubungan kasih sayang yang timbal balik dan persatuan yang intim dari suami dan istri serta orang tua dan anak-anak.

Tipe keluarga patriarkial adalah tipe yang paling erat dengan konstruksi keluarga ideal dari keluarga sebagai lembaga dengan kombinasinya tentang kekuatan sanksi dan tata kelakuan, agama dan hukum, serta secara praktis melengkapi rendahnya anggota-anggota individu-individu keluarga terhadap otoritas kepala keluarga (Khairuddin, 1997: 43-45).

2. Fungsi-fungsi pokok keluarga

Pada dasarnya keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok yakni fungsi yang sulit diubah dan digantikan oleh orang lain. Sedangkan fungsi-fungsi lain atau fungsi-fungsi sosial, relatif lebih mudah berubah atau mengalami perubahan. Fungsi-fungsi pokok tersebut antara lain (Khairuddin, 1997: 48-49):

a. Fungsi biologik

Keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak, fungsi ini merupakan dasar kelangsungan hidup masyarakat. Namun fungsi ini juga mengalami perubahan karena keluarga sekarang cenderung pada jumlah anak yang sedikit.

b. Fungsi afeksi

Dalam keluarga terjadi hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan dan afeksi. Hubungan afeksi ini tumbuh sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan. Berdasarkan hubungan cinta kasih ini lahirlah hubungan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, identifikasi, persamaan pandangan mengenai nilai-nilai. Dasar cinta kasih dan hubungan afeksi ini merupakan faktor penting bagi perkembangan pribadi anak. Dalam masyarakat yang makin impersonal, sekuler, dan asing, pribadi sangat membutuhkan hubungan afeksi seperti yang terdapat dalam keluarga, suasana afeksi itu tidak terdapat dalam institusi sosial yang lain.

c. Fungsi sosialisasi

Fungsi sosialisasi menunjukkan peranan keluarga dalam kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga, anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya.

3. Peranan keluarga terhadap perkembangan Individu

Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat di mana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya.

Semua yang diuraikan mengenai interaksi kelompok berlaku pula bagi kelompok keluarga yang merupakan kelompok primer, termasuk pembentukan norma-norma sosial, internalisasi norma-norma, terbentuknya tingkahlaku individu (behaviorisme), dan lain-lain. Di dalam keluarga interaksi sosial individu berdasarkan simpati, pertama-tama belajar memperhatikan keinginan – keinginan orang lain, belajar bekerjasama, dan saling membantu.

Interaksi sosial individu, seseorang pertama-tama belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan dalam pergaulannya dengan orang lain. Pengalaman-pengalaman dalam interaksi sosial dalam keluarga turut menentukan pula cara-cara tingkah lakunya terhadap orang lain dalam pergaulan sosial diluar keluarganya, didalam masyarakat pada umumnya juga berlangsung tidak wajar.

Selain peranan umum kelompok keluarga sebagai kerangka sosial yang pertama, tempat manusia berkembang sebagai makhluk sosial, terdapat pula peranan-peranan tertentu di dalam keadaan-keadaan keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan individu sebagai makhluk sosial, antara lain :

a. Status sosio-ekonomi

Keadaan sosio-ekonomi keluarga tentulah berpengaruh terhadap perkembangan individu, apabila kita perhatikan bahwa adanya perekonomian yang cukup, maka lingkungan material yang dihadapi individu di dalam keluarganya itu lebih luas, ia lebih mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan bermacam-macam kecakapan yang tidak dapat ia kembangkan apabila tidak ada peranannya. Hubungan orang tua dalam status sosial-ekonomi serba cukup dan kurang mengalami tekanan-tekanan fundamental seperti dalam memperoleh nafkah hidupnya yang memadai. Orang tua dapat mencurahkan perhatian yang lebih mendalam pada pendidikan anaknya apabila ia tidak dibebani dengan masalah kebutuhan primer kehidupan manusia.

Hal tersebut dapat dianggap benar secara umum, namun status sosial ekonomi tidak merupakan faktor mutlak dalam perkembangan sosial individu karena bergantung pada sikap orangtua dan bagaimana corak interaksi individu di dalam keluarganya.

b. Keutuhan keluarga

Salah satu faktor utama lain yang mempengaruhi perkembangan sosial individu adalah faktor keutuhan keluarga. Yang dimaksudkan dengan keutuhan keluarga adalah keutuhan dalam struktur keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Apabila tidak ada ayah atau ibu atau bahkan keduanya, maka struktur keluarga sudah tidak utuh lagi. Selain keutuhan dalam struktur keluarga dimaksudkan pula keutuhan dalam interaksi keluarga, bahwa dalam keluarga berlangsung interaksi sosial yang wajar (harmonis). Apabila orang tua berselisih disertai dengan tindakan agresif, keluarga tidak dapat dikategorikan sebagai keluarga yang utuh.

c. Sikap dan kebiasaan orangtua

Peranan keluarga terhadap perkembangan sosial individu tidak hanya terbatas pada status sosial ekonominya atau pada keutuhan struktur dan interaksinya saja. Demikian juga cara-cara dan sikap-sikap dalam pergaulannya memegang peranan yang cukup penting di dalamnya. Keluarga itu telah merupakan kelompok sosial dengan tujuan, struktur, norma, dinamika kelompok, termasuk cara-cara kepemimpinannya yang sangat mempengaruhi kehidupan individu yang menjadi anggota keluarga tersebut. Begitu pula cara-cara bertingkah laku orang tua yang dalam hal ini menjadi pemimpin kelompok sangat mempengaruhi suasana interaksi keluarga dan dapat merangsang perkembangan ciri-ciri tertentu pribadi anaknya.

H. Klasifikasi Kesejahteraan Keluarga dan Indikator menurut BKKBN

1. Kesejahteraan Keluarga menurut BKKBN

Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tentram. Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang /maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. (BKKBN, 1994:5)

Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran saja, melainkan juga harus secara keseluruhan sesuai dengan ketentraman yang berarti dengan kemampuan itulah dapat menuju keselamatan dan ketentraman hidup. Dalam rencana pembangunan nasional memberikan petunjuk bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada terwujudnya keluarga sebagai wahana persmian nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga serta membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan. Undang-Undang No.10/1992 pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada pembangunan ku kualitas keluarga yang bercirikan kemandirin, ketahanan keluarga dan kemandirian keluarga .

a. Tujuan Keluarga Sejahtera

Bertujuan untuk mengembangkan keluarga agar timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik merupakan salah satu pembentuk ketahanan keluarga dalam membangun keluarga sejahtera.

Pelaksanaan pembangunan dalam keluarga sejahtera dalam PP No. 21 Th 1994, pasal 2: pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui pengembangan kualitas keluarga diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu oleh masyarakat dan keluarga. Tujuan : Mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, produktif, mandiri dan memiliki kemampuan untuk membangun diri sendiri dan lingkungannya.

b. Tahap Keluarga Sejahtera

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, berdasarkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah mengadakan program yang disebut dengan Pendataan Keluarga. Yang mana pendataan ini bertujuan untuk memperoleh data tentang dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Adapun pentahapan keluarga sejahtera tersebut ialah sebagai berikut:

1. Keluarga pra sejahtera

Keluarga pra sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB.

- Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga
- Pada umumnya seluruh anggota keluarga, makan dua kali atau lebih dalam sehari.

- Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian berbeda di rumah, bekerja, sekolah atau berpergian.
- Bagian yang terluas dari lantai bukan dari tanah.
- Bila anak sakit dan atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa ke sasaran kesehatan.

2. Keluarga Sejahtera I

Keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Pada keluarga sejahtera I kebutuhan dasar (a s/d e) telah terpenuhi namun kebutuhan sosial psikologi belum terpenuhi yaitu:

- Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- Paling kurang sekali seminggu, keluarga menyediakan daging, ikan atau telur.
- Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 stel pakaian baru pertahun
- Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap pengguna rumah
- Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat
- Paling kurang satu anggota 15 tahun keatas, penghasilan tetap.
- Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun bisa baca tulis huruf latin.
- Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini

- Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga pasang yang usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

3. Keluarga Sejahtera II

Keluarga sejahtera II yaitu keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Pada keluarga sejahtera II kebutuhan fisik dan sosial psikologis telah terpenuhi (a s/d n telah terpenuhi) namun kebutuhan pengembangan belum yaitu:

- Mempunyai upaya untuk meningkatkan agama.
- Sebagian dari penghasilan dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
- Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
- Ikut serta dalam kegiatan masyarakat dilingkungan keluarga.
- Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang 1 kali perbulan.
- Dapat memperoleh berita dan surat kabar, radio, televisi atau majalah.
- Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi sesuai kondisi daerah.

4. Keluarga Sejahtera III

Keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan :

A. Faktor intern keluarga

1. Jumlah anggota keluarga

Pada zaman seperti sekarang ini tuntutan keluarga semakin meningkat tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan sarana pendidikan) tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, sarana untuk transportasi dan lingkungan yang serasi. Kebutuhan di atas akan lebih memungkinkan dapat terpenuhi jika jumlah anggota dalam keluarga sejumlah kecil.

2. Tempat tinggal

Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Keadaan tempat tinggal yang diatur sesuai dengan selera keindahan penghuninya, akan lebih menimbulkan suasana yang tenang dan mengembirakan serta menyejukan hati. Sebaliknya tempat tinggal yang tidak teratur, tidak jarang menimbulkan kebosanan untuk menempati. Kadang-kadang sering terjadi ketegangan antara anggota keluarga yang disebabkan kekacauan pikiran karena tidak memperoleh

rasa nyaman dan tentram akibat tidak teraturnya sasaran dan keadaan tempat tinggal.

3. Keadaan sosial ekonomi keluarga.

Untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga alasan yang paling kuat adalah keadaan sosial dalam keluarga. Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bilamana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga. manifestasi daripada hubungan yang benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa penuh kasih sayang, nampak dengan adanya saling hormat, menghormati, toleransi, bantu-membantu dan saling mempercayai.

4. Keadaan ekonomi keluarga.

Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga makin terang pula cahaya kehidupan keluarga. (BKKBN, 1994 : 18-21). Jadi semakin banyak sumber-sumber keuangan/ pendapatan yang diterima, maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga. Adapun sumber-sumber keuangan/ pendapatan dapat diperoleh dari menyewakan tanah, pekerjaan lain diluar berdagang, dsb.

B. Faktor ekstern

Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan terjadinya kegoncangan dan ketegangan jiwa diantara anggota keluarga perlu dihindarkan, karena hal ini dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga.

3. Indikator kesejahteraan

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan, telah dikembangkan beberapa indikator operasional yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangan. Sedangkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat kesejahteraan akan digunakan beberapa indikator yang telah digunakan oleh BKKBN. Indikator ini berdasarkan pendataan keluarga tahun 2000, adapun beberapa indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Keluarga Pra Sejahtera

1. Keluarga Sejahtera I:

- a. Melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing
- b. Makan dua kali sehari atau lebih.
- c. Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan.
- d. Lantai rumah bukan dari tanah.
- e. Jika anak sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan.

2. Keluarga Sejahtera II

- a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing.
- b. Minimal seminggu sekali keluarga tersebut menyediakan daging/ ikan/ telur sebagai lauk pauk.
- c. Memperoleh pakaian baru dalam setahun terakhir.
- d. Luas lantai tiap penghuni rumah satu 8 m².
- e. Anggota keluarga sehat dalam keadaan tiga bulan terakhir, sehingga dapat menjalankan fungsi masing-masing.

- f. Keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
- g. Bisa baca tulis latin bagi anggota keluarga dewasa yang berumur 10-60 tahun.
- h. Seluruh anak yang berumur 7-15 tahun bersekolah pada saat ini.
- i. Anak hidup dua atau lebih dan saat ini masih memakai alat kontrasepsi.

3. Keluarga Sejahtera III

- a. Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- b. Keluarga mempunyai tabungan.
- c. Keluarga biasanya makan bersama minimal sekali dalam sehari.
- d. Turut serta dalam kegiatan masyarakat.
- e. Keluarga mengadakan rekreasi bersama minimal sekali dalam 6 bulan.
- f. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/ radio/ televisi/ majalah.
- g. Anggota keluarga dapat menggunakan sarana transportasi.

4. Keluarga Sejahtera III Plus:

- a. Memberikan sumbangan secara teratur dan sukarela untuk kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
- b. Aktif sebagai pengurus yayasan/ instansi.

I. Perkawinan Dalam Adat Sumba

Perkawinan yang terjadi dalam masyarakat Sumba dikategorikan sebagai perkawinan eksogami yaitu perkawinan di luar suku, di mana lelaki anggota suku A menikah dengan perempuan anggota suku B tetapi tidak boleh sebaliknya. Klan penerima gadis disebut *doma* sedangkan klan pemberi gadis disebut *loka*. *Loka* adalah panggilan yang ditujukan kepada saudara laki-laki ibu. Karena secara tradisional mereka adalah pemberi gadis untuk dinikahi oleh laki-laki dari klan ayah, maka *loka* juga diartikan sebagai kabisu pemberi gadis. Sementara klan ayah penerima gadis disebut *doma*.

Konsep perkawinan semacam ini dengan adanya klan penerima dan pemberi gadis mengharuskan paling sedikit keterlibatan tiga kabisu. Misalnya kabisu A, B dan C. Kabisu A sebagai pemberi gadis untuk kabisu B, Kabisu B sebagai pemberi gadis untuk kabisu C dan kabisu C sebagai pemberi gadis untuk kabisu A. Karena kabisu A adalah pemberi gadis untuk kabisu B maka kaum lelaki kabisu A tidak diperbolehkan menikahi wanita dari kabisu B, dengan kata lain tidak boleh terjadi saling bertukar peran diantara kabisu pemberi dan penerima gadis. Pernikahan dengan sesama anggota suku juga dilarang keras, bahkan dianggap sebagai perilaku *incent* yang bisa mendatangkan malapetaka, yang hanya bisa dipulihkan melalui upacara pemujaan. Pelanggaran-pelanggaran lain misalnya perselingkuhan atau hubungan luar nikah (dengan anggota kabisu yang masuk kategori boleh menikah) biasanya diselesaikan melalui pembayaran denda yang disebut *kanyala*. Karena dianggap sebagai penerus garis darah yang hanya mengalir lewat perempuan, kedudukan klan pemberi gadis (*loka*) selalu lebih tinggi dari

pihak penerima gadis (*doma*). Kedudukan ini membawa banyak keuntungan antara lain bisa menentukan besarnya mas kawin (*belis*) yang harus dibayar pihak laki-laki. Perkawinan di Sumba umumnya dilakukan melalui tahapan berikut (Anisah Umar Bamualim, 2013:45 – 58):

a. *Ngidi Pamama*:

Ngidi Pamama yaitu semacam acara lamaran di mana pihak laki-laki datang ke kediaman pihak perempuan untuk menyatakan maksud mereka dengan membawa sirih-pinang dan satu ekor kuda. Jika maksud diterima, pihak perempuan balas memberikan sepasang kain tenun dan seekor babi (yang disembelih saat itu juga) sebagai tanda persetujuan. Pada kesempatan ini kedua belah pihak mulai merencanakan tahap negosiasi berikutnya dan menetapkan tanggal pertemuan selanjutnya.

b. *Weri Kawedo*

Pada tahap ini pihak laki-laki datang ke kediaman pihak perempuan dengan membawa setidaknya 1 sampai 5 ekor kerbau dan satu ekor kuda jantan. Maksud kedatangan mereka adalah untuk melakukan pembicaraan penting seputar belis yang harus dibayar. Karena seluruh urusan ini dilakukan dalam bahasa-bahasa adat yang penuh kiasan, di mana keliru bicara atau keliru menerjemahkan maksud pihak lain bisa sangat merugikan pihak sendiri, maka diperlukan seseorang dengan keahlian dan kharisma khusus untuk bertindak sebagai juru bicara bagi masing-masing pihak.

Perantara ini disebut *Wunang*, mereka yang melakukan pembicaraan adat lalu bolak-balik berkonsultasi dengan pihak keluarga. Pihak keluarga perempuan berkumpul di *mbale katounga* sedangkan keluarga laki-laki

duduk di beranda depan bersama para wunang. Permintaan belis dinyatakan secara simbolis lewat kain tenun yang diletakkan di atas tempat sirih pinang lalu disajikan di depan wunang. Selebar kain sama dengan 10 ekor hewan, jadi dua lembar berarti 20 ekor dan seterusnya. Proses negosiasi bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan ada yang sampai tengah malam, di mana pengaruh keluarga besar sering mempersulit pengambilan keputusan. Jika kesepakatan dicapai, pihak wanita memberikan satu ekor babi yang dipotong saat itu juga lalu dagingnya dibagikan kepada seluruh peserta sebagai tanda kesepakatan.

c. *Dutu Mawinne:*

Secara harafiah berarti mengiring perempuan atau lebih tepat menggiring mempelai wanita untuk berpindah kekediaman suaminya. *Dutu mawine* bisa dilaksanakan bersamaan dengan *weri kawedo* jika pada saat itu belis dibayar lunas, tapi yang lebih sering selepas beberapa hari atau beberapa minggu. Pada kesempatan ini rombongan laki-laki membawa sejumlah belis yang telah disepakati. Kerbau, kuda, pedang atau parang, tombak serta mamoli emas, yang dibalas pihak perempuan dengan babi dan kain tenun (jumlahnya disesuaikan dengan pemberian pihak laki-laki). Mamoli emas yang mereka bawa diserahkan langsung oleh ibu mempelai laki-laki kepada ibu mempelai wanita. Mamoli ini diistilahkan sebagai *watu mata* (biji mata) yang melambangkan penghargaan terhadap usaha keras seorang ibu dalam membesarkan anak perempuannya yang sebentar lagi akan dibawa pergi. Selanjutnya, ayah dari gadis memberikan sepasang kain tenun kepada pengantin laki-laki sebagai simbol telah diterima sebagai

menantu, yang harus dibalas sang menantu baru dengan satu batang tombak. Setelah tiba di kediaman suami, pengantin wanita harus menjalani *ritual aila na yee* yaitu meletakkan kain tenun di tiang utama rumah adat (di sebagian wilayah, kain tenun diletakkan di atas batu kubur). Ritual ini dimaksudkan sebagai pemberitahuan kepada *marapu* pendiri rumah bahwa istri baru kini telah menjadi bagian rumah adat itu dan resmi berpindah ke kabisu suaminya. Kain tenun juga diserahkan kepada mertua dan sejumlah kerabat tertentu sebagai tanda penghormatan dan penerimaan.

J. Landasan Teori

1. Teori Pilihan Rasional

Dasar untuk semua bentuk teori pilihan rasional adalah asumsi bahwa fenomena sosial yang kompleks dapat dijelaskan dalam kerangka dasar tindakan individu dimana mereka tersusun. Sudut pandang ini, yang disebut metodologi individualisme, menyatakan bahwa, Unit elementer kehidupan sosial adalah tindakan individu. Untuk menjelaskan lembaga sosial dan perubahan sosial adalah untuk menunjukkan bagaimana mereka timbul sebagai akibat dari aksi dan interaksi individu. Dalam teori pilihan rasional, individu didorong oleh keinginan atau tujuan yang mengungkapkan 'preferensi'. Mereka bertindak dengan spesifik, mengingat kendala dan atas dasar informasi yang mereka miliki tentang kondisi di mana mereka bertindak. Paling sederhana, hubungan antara preferensi dan kendala dapat dilihat dalam istilah-istilah teknis yang murni dari hubungan dari sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Karena tidak mungkin bagi individu untuk mencapai semua dari berbagai hal-hal yang mereka inginkan, mereka juga harus membuat pilihan dalam

kaitannya dengan tujuan mereka berdua dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Teori pilihan rasional berpendapat bahwa individu harus mengantisipasi hasil alternatif tindakan dan menghitung bahwa yang terbaik untuk mereka. Rasional individu memilih alternatif yang akan memberi mereka kepuasan terbesar.

Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor dimana aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakan tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut, aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta keperluan. Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor.

Teori pilihan rasional James Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan, tetapi selain Coleman menyatakan bahwa untuk maksud yang sangat teoritis, dimana memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi dimana memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. (Setiabudhi dan Hardywinoto, 1999: 40)

Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Coleman mengakui bahwa dalam kehidupan nyata orang tak selalu berperilaku rasional, namun ia merasa bahwa hal ini hampir tak berpengaruh

terhadap teorinya. Pemusatan perhatian pada tindakan rasional individu dilanjutkannya dengan memusatkan perhatian pada masalah hubungan mikro-makro atau bagaimana cara gabungan tindakan individu menimbulkan perilaku sistem sosial. Meski seimbang, namun setidaknya ada tiga kelemahan pendekatan Coleman. Pertama ia memberikan prioritas perhatian yang berlebihan terhadap masalah hubungan mikro dan makro dan dengan demikian memberikan sedikit perhatian terhadap hubungan lain. Kedua ia mengabaikan masalah hubungan makro-makro. Ketiga hubungan sebab akibatnya hanya menunjuk pada satu arah, dengan kata lain ia mengabaikan hubungan dialektika di kalangan dan di antara fenomena mikro dan makro.

Menurut teori pilihan rasional diatas adalah setiap orang atau individu ketika mengambil sebuah tindakan didasari oleh nalar yang rasional, memaksimalkan kegunaan, memuaskan keinginan dan kebutuhan. Dalam teori pilihan rasional, pilihan, keyakinan, dan tindakan akan di katakana rasional apabila tindakan tersebut memiliki hubungan dengan pilihan dan keyakinan.

Dalam Interaksi sosial menurut Homans, dan Blau (Setiabudhi dan Hardywinoto, 1999: 43) mengemukakan bahwa interaksi sosial didasarkan atas hukum pertukaran barang dan jasa. Ketika sebuah inisiasi pertukaran timbal balik atau sebuah tawaran yang diterima, pertukaran yang menghasilkan keuntungan disebut sebagai transaksi dan sejumlah transaksi yang berlangsung menghasilkan hubungan pertukaran. Pertukaran sosial merupakan aktivitas bersama yang dilakukan masing-masing pihak yang melakukan pertukaran.

Menurut Blau dalam (Haryanto, 2012: 183) banyak orang tertarik pada satu sama lain karena banyak alasan yang memungkinkan mereka membangun

sebuah asosiasi sosial atau sebuah organisasi sosial. Begitu ikatan awal sudah terbentuk maka ganjaran yang mereka berikan kepada sesamanya dapat berfungsi untuk mempertahankan dan menguatkan ikatan itu. Namun dibalik itu, ganjaran yang tidak seimbang juga dapat memperlemah atau bahkan menghancurkan asosiasi itu sendiri yang akan melahirkan sebuah eksploitasi kekuasaan. Ganjaran yang dimaksud dalam ini pertama adalah ganjaran yang bersifat Intrinsik, seperti cinta, kasih sayang, afeksi, dan lain-lain. Ganjaran yang kedua adalah ganjaran yang bersifat ekstrinsik, seperti uang, barang, dan bahan material lainnya. Teori pertukaran sosial untuk memahami struktur sosial berdasarkan analisis proses sosial yang mempengaruhi hubungan antara individu dan kelompok.

Teori pertukaran di atas menjelaskan bahwa bagaimana pertukaran sosial yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan ikatan atau menjalin hubungan dengan menghasilkan adanya keuntungan dari pertukaran tersebut. Blaw memusatkan perhatian kepada proses pertukaran yang menurutnya mengatur kebanyakan perilaku manusia dalam menjalin hubungan antar individu maupun kelompok. Pertukaran sosial yang dimaksud terbatas pada tindakan-tindakan yang tergantung pada reaksi- reaksi penghargaan dari orang lain dan berhenti apabila reaksi-reaksi yang diharapkan ini tidak kunjung datang.